

EKONOMI POLITIK UANG: PERSPEKTIF SOSIAL-HISTORIS

Moh. Nizar¹

¹Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Lampung
moh.nizar@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Uang sebagai alat tukar dalam dunia sosial telah mengalami hikayat atau sejarah yang panjang, namun perubahan demi perubahan bentuk uang tidak terlepas dari kepentingan ekonomi politik kekuasaan negara. Dalam konteks ini, meskipun penggunaan uang dengan standar nilai tertentu awalnya dilakukan oleh para pedagang karena sulitnya sistem barter, namun dalam perjalanan hikayat uang ia tidak hanya semata-mata sebagai alat transaksi melainkan juga menjadi bagian dari instrumen kekuasaan hegemon. Pada konteks di atas paper ini dibuat untuk menjelaskan tentang hikayat uang dari zaman *denarius* sampai memasuki era *Bretton Woods* dengan menggunakan pendekatan sosial historis. Berdasarkan kesimpulan paper ini menunjukkan bahwa setiap kali terjadi perubahan bentuk uang dari satu model ke model yang lainnya tidak terjadi secara alami begitu saja, namun di sebaliknya terdapat faktor-faktor sosial historis yang melatarbelakangi. Dengan kata lain, setiap kali terjadi perubahan sistem moneter selalu ada aktor (negara) yang mengambil manfaat atau didasarkan kepada kepentingan hegemoni untuk melayani kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional.

Kata Kunci: Uang, Denarius, Bretton Woods, Sistem Moneter

"The Political Economy of Money: A Sociol-Historical Perspective"

Abstract

Money as a medium of exchange in the social world has undergone a long history, but the changes in the forms of money are inseparable from the political-economic interests and the power of the state. In this context, although the use of money with a certain standard value was initially carried out by merchants due to the difficulties of the barter system, in the course of its history, money has not only served as a transaction tool but has also become part of the hegemonic power instrument. In this context, this paper is written to explain the history of money from the era of the Denarius to the era of Bretton Woods using a socio-historical approach. Based on the conclusions of this paper, it is shown that every change in the form of money from one model to another does not occur naturally, but rather there are socio-historical factors behind it. In other words, every time a monetary system changes, there is always an actor (the state) that benefits or bases it on hegemonic interests to serve foreign policy and national interests.

Keywords: Money, Denarius, Bretton Woods, Monetary System

PENDAHULUAN

Uang sebagai instrumen perdagangan memainkan peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat karena dengan uang baik barang maupun jasa bisa dijual dan dibeli. Sebaliknya, tanpa uang tidak ada jaminan setiap orang bersedia mau “berbagi” barang atau memberikan bantuan gratis kepada orang lain atau cukup “ditukarkan” dengan komoditas tertentu lainnya. Pada konteks yang pertama (baca: berbagi) ini, sebutlah sebagai ekonomi gotong royong dimana setiap orang secara suka rela bersedia berbagi barang atau bantuan gratis kepada orang lain. Namun, adakah mereka juga akan melakukan kepada orang asing? Demikian pula sebaliknya, orang yang tidak dikenal akan melakukan tindakan yang sama. Meskipun hal itu dapat saja terjadi, tapi tentu saja tidak akan berlaku terus menerus.

Sementara itu pada konteks yang kedua (baca: barter), asumsikan Anda memiliki sebuah kebun kopi dengan kualitas terbaik, lalu suatu waktu hendak membangun gubuk baru dan perlu mendatangkan para tukang. Setelah gubuk Anda selesai dibangun, tenaga tukang-tukang itu dibayarkan dengan sekarung kopi. Tidak lama kemudian, tetangga Anda yang juga seorang petani kopi berminat untuk membangun gubuk yang sama, dan tukang itupun kembali dipanggil. Tapi sekali lagi, tetangga Anda juga memberikan sekarung kopi sebagai pengganti jasanya. Semakin hari

tukang-tukang itu mendapatkan berkarung-karung kopi lantaran semakin banyak orang yang meminta jasanya. Di lain waktu, salah satu tukang kemudian pergi ke pasar membeli peralatan pertukangan yang dibayarnya dengan sekarung kopi yang diperoleh dari jasa membangun gubuk-gubuk itu. Tukang itu lantas memberi tahu kepada teman-temannya bahwa ia baru menukar sekarung kopi dengan alat-alat pertukangan di pasar. Mengetahui informasi tersebut, para tukang lainnya yang juga surplus kopi menukarkan dengan peralatan pertukangan di toko yang sama. Pemilik toko tertegun ketika ketika melihat tumpukan kopi dari kualitas terbaik hingga terendah semakin hari terus bertambah. Hal itu belum ditambah komoditas beras, pisang, dan kelapa yang ditukarkan oleh pelanggan lainnya yang juga terus menggunung. Sementara bagi pemilik toko, tidak mudah untuk menyimpan barang-barang tersebut hingga menemukan orang yang menginginkan. Singkatnya, dari gambaran di atas tampak bahwa sistem barter memiliki keterbatasan dan tidak bisa menjadi basis aktivitas perdagangan yang kompleks.

Dalam sistem barter, antara pemilik barang atau jasa dengan yang membutuhkan mulai dihadapkan tentang kesepakatan harga-harga relatif dari setiap barang atau jasa yang dipertukarkan. Misalnya berapa karung kopi yang harus dibayarkan atau yang setara dengan jasa pembuatan satu gubuk, begitu juga berapa kilo kopi yang harus dibayarkan

oleh tukang ketika hendak menukarnya dengan sebilah kapak, demikian pula berapa kilo kopi atau yang harus dibayarkan pemilik toko ketika akan memesan satu lusin alat bangunan kepada pandai besi. Namun, tentu tidak setiap orang membutuhkan komoditas yang ditawarkan oleh pihak lainnya. Dihadapkan pada permasalahan tersebut, pada perkembangannya masyarakat mengembangkan uang sebagai alat transaksi pembayaran barang dan jasa yang sah. Hal itu mengingat sebagian sebagian besar komoditas yang dipertukarkan lebih mudah rusak dibandingkan uang, dan pedagang mungkin sering mengalami kerugian yang jauh lebih besar dengan menyimpannya.

Penggunaan uang sebagai alat tukar tidak selalu dalam bentuk koin atau kertas. Di sini yang dimaksud uang meliputi apa saja yang orang-orang bersedia menggunakannya dalam rangka menyatakan nilai benda-benda lain secara sistematis untuk tujuan pertukaran barang dan jasa. Oleh karenanya, sebelum penggunaan koin sebagai alat tukar benda-benda seperti kerang, sapi, kulit, garam, biji-bijian, manik-manik, dan promes pernah digunakan sebagai alat pembayaran yang sah (Harari, 2020). Namun, agar kegiatan komersial berjalan maksimal dibutuhkan suatu jenis uang yang standar nilainya harus disepakati bersama. Yang dengan itu memungkinkan setiap orang berdagang dimana saja dengan pihak manapun. Dalam kaitan ini, penggunaan uang dengan standar

nilai tertentu muncul pertama kali di kalangan pedagang bangsa kerajaan Lydia akibat kesulitan dengan sistem barter. Maka bertolak atas kebutuhan tersebut, Raja Alyattes sekitar 640 SM secara resmi mengeluarkan uang koin dengan bobot standar emas dan perak—dan hampir semua koin yang digunakan sekarang adalah keturunan dari koin-koin Lydia.

Pada abad ke-1 M, koin-koin Roma yang dikenal dengan sebutan *denarius* diterima sebagai alat transaksi pembayaran di luar perbatasan imperium Romawi. Bahkan pada masa kekhalifahan nama *denarius* diarabkan menjadi “dinar” sebagai nama mata uang resmi pemerintahan Islam. Hingga era moderen emas tetap menjadi mata uang penting yang berlaku sebagai alat pembayaran perdagangan global. Namun, dalam melakukan kegiatan perdagangan setiap negara membutuhkan kesepakatan mengenai alat pembayaran yang digunakan sebagai alat transaksi, misalnya, mata uang yang digunakan apakah mata uang asing atau mata uang masing-masing negara serta berapa besar nilainya. Semua permasalahan yang berkaitan dengan mata uang suatu negara dengan negara lain inilah yang kemudian melahirkan zona moneter tunggal transnasional dan transkultural. Zona moneter tersebut mula-mula bertumpu pada emas dan perak, kemudian pada beberapa mata uang terpercaya seperti poundsterling dan dolar Amerika.

Bertolak pada uraian di atas, tulisan ini memfokuskan diri pada penelusuran sejarah uang melalui perspektif sosial-historis dengan menempatkan uang sebagai alat tukar yang senantiasa berkelindan dengan relasi ekonomi politik. Dalam hal ini, setiap terjadi perubahan sistem moneter tidak lepas dari kepentingan aktor-aktor dominan dalam konfigurasi politik global.

PERUBAHAN REZIM ALAR TUKAR

Untuk mempermudah transaksi perdagangan antarbangsa dipandang penting untuk membentuk suatu sistem moneter internasional. Dalam kaitan ini, secara historis sistem moneter internasional telah melewati lima tahap, yaitu; 1) bimetalisme; 2) standar emas klasik; 3) periode Perang Dunia I dan Perang Dunia II; 4) sistem Bretton Woods; 5) Pasca Bretton Woods: kurs tukar fleksibel—nilai tukar tetap (*fixed-rate*) dan nilai tukar mengambang (*floating-rate*). Pada setiap perubahan dari satu sistem moneter ke moneter lainnya selalu ada rezim yang berkepentingan di dalamnya, hal ini sejalan dengan logika politik internasional bahwa setiap negara dalam upaya merebut dan mempertahankan kekuasaan di hadapan bangsa-bangsa lainnya akan memaksimalkan kekuatan ekonomi dan politiknya demi kepentingan nasional.

Sistem Bimetalisme: Sebelum 1875

Bimetalisme dapat didefinisikan sebagai kebijakan moneter dimana nilai mata uang terkait dengan nilai dua logam,

biasanya (tetapi tidak selalu) perak dan emas. Nilai dari dua logam itu dihubungkan satu sama lain, yakni nilai perak dinyatakan dalam hal emas dan sebaliknya nilai emas dinyatakan dengan perak. Kedua logam tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam jumlah yang tidak terbatas. Biasanya, koin emas digunakan untuk transaksi besar sementara koin perak untuk transaksi-transaksi harian yang nilainya kecil atau untuk membayar pajak. Jadi oleh karena pemakaian alat transaksi menggunakan dua logam tersebut dikenal sebagai sistem bimetalisme: logam ganda. Dalam sistem bimetalisme, emas dan perak dicetak dan beredar secara bersamaan dalam bentuk uang koin sesuai nominal, berat dan kemurniannya ditetapkan berdasarkan permintaan pasar dengan nilai tukar tetap.

Beberapa abad sebelum 1870-an, banyak negara (diantaranya Amerika Serikat dan Perancis) menggunakan standar bimetalisme. Di Amerika (dari 1792-1900) relasi pertukaran antara perak dan emas ukurannya 15 berbanding 1 atau 1 ons emas bernilai 15 ons perak, hal ini kemudian disesuaikan dengan 16:1. Stabilitas hubungan antara kedua logam tergantung pada produksi yang seimbang, dan keunggulan dari sistem ini bisa menjadi jaring pengaman deflasi. Misalnya jika pasokan salah satu logam terlalu lambat dan tidak dapat memenuhi permintaan pasar maka logam lainnya bisa

menjadi substitusi. Dengan begitu, negara yang menganut kebijakan bimetalisme mampu menurunkan harga instabilitas harga dibandingkan hanya menggunakan satu logam (monometalisme), emas maupun perak. Meskipun demikian, untuk mempertahankan peredaran koin emas dan perak pada level yang seimbang tentunya tidak mudah. Maka di sini, jika terdapat produksi berlebih dari satu logam solusinya harus ada permintaan yang tinggi terhadap logam tersebut untuk menciptakan keseimbangan sirkulasi peredaran kedua logam (Rothermund, 2008). Dalam kaitan ini, jika terjadi persediaan berlebih dari salah satu logam maka orang-orang akan bereaksi dengan cepat untuk menstabilkan permintaan.

Meskipun demikian, pangkal soalnya banyak proyek untuk pekerjaan yang relatif lebih lama lebih memilih menggunakan standar emas karena nilainya lebih tinggi dibandingkan perak. Kondisi ini membuat sistem bimetalisme menjadi tidak stabil akibat terjadinya perpindahan salah satu logam ke standar logam utama (monometalisme) yang nilai dianggap lebih tinggi. Artinya sistem monometalisme lebih diminati, dan diantara dua pilihan monometalisme tentu emas menjadi pilihan dominan. Dihadapkan pada permasalahan tersebut pada tahun 1870-an sistem bimetalisme ditinggalkan karena dipandang dapat memicu deflasi akibat demonetisasi

terhadap mata uang perak yang cenderung lebih rendah. Namun terlepas dari permasalahan tersebut, perubahan sistem kebijakan moneter bimetalisme ke monometalisme (standar tunggal) bermula dari keputusan Inggris sebagai kekuatan ekonomi terbesar saat itu, dimana pada 1821 Inggris menghentikan bimetalisme dan beralih ke standar emas.

Standar Emas Klasik: 1875-1914

Motif yang mendorong Inggris menggunakan standar emas terlebih London adalah tempat perdagangan global dan sebagai pusat finansial dunia. Artinya, Inggris diuntungkan oleh aliran bebas emas dari transaksi-transaksi perdagangan globalnya. Hal ini selaras dengan posisi Inggris sebagai pusat kekaisaran kolonial yang memiliki akses terhadap tambang-tambang emas dan komoditi-komoditi ekspor di wilayah-wilayah koloninya. Disamping itu, adanya keharusan pembayaran menggunakan standar emas terhadap ongkos-ongkos dalam negeri atau upeti yang harus dibayarkan negeri jajahan semakin menambah kepercayaan diri. Karena fakta inilah tidak mengejutkan jika kebijakan sistem monometalisme Inggris sama sekali tidak ditiru oleh negeri-negeri lainnya—pada waktu itu Perancis dan Amerika tetap mempertahankan sistem bimetalisme.

Satu catatan yang perlu diingat bahwa kemajuan Inggris menggantikan imperium-imperium Eropa pendahulu tidak lain karena

kekuatan kapital di belakangnya. Hal ini sebagaimana abad merkantilisme bahwa kolonialisme tumbuh sebagai akibat ekspansi kapital yang membiayai eksplorasi-eksplorasi dan penaklukan-penaklukan negeri-negeri di luar Eropa. Hubungan antara kapitalisme dan imperialisme dimulai sejak abad 16, dimana Spanyol berubah menjadi negara paling kuat di Eropa dengan jangkauan kekuasaan meliputi bagian Eropa dan bagian-bagian besar Amerika Utara dan Selatan, Kepulauan Filipina segaris basis sepanjang pesisir di Afrika dan Asia, adalah dimulai ketika penguasa Spanyol bersedia mendanai proyek pelayaran Columbus dalam mencari rute perdagangan baru menuju Asia Timur—sebelumnya Columbus sempat menawarkan proposalnya kepada investor Italia, Perancis, Inggris, dan Portugal. Posisi Spanyol lalu tergantikan Belanda sebagai negara terkaya di Eropa, yang juga berkat kekuatan kapital yang membiayai pembentukan angkatan perang dan armada. Dengan kekuatan itu Belanda mampu mengontrol dan memonopoli jalur-jalur perdagangan dunia, dan dalam beberapa tahun mendapatkan laba besar. Sampai-sampai Amsterdam menjadi salah satu pelabuhan paling penting di Eropa, bahkan menjadi kiblat keuangan benua itu.

Menjelang berakhirnya abad ke-17, Belanda mulai kehilangan posisi sebagai mesin finansial dan imperium Eropa. Kekosongan ini diperebutkan secara sengit

antara Perancis dan Inggris. Mula-mula Perancis lebih kuat, dan lebih besar dibandingkan Inggris. Namun Inggris berhasil meraih kepercayaan sistem finansial setelah Perancis kehilangan kepercayaan para bankir dan investor akibat krisis *Mississippi Bubble*, yaitu krisis finansial terbesar Eropa abad ke-18. Jadi sebagaimana imperium-imperium sebelumnya, imperium Inggris tegak berdiri dikarenakan adanya kekuatan kapital yang tergabung dalam perusahaan-perusahaan saham gabungan yang berbasis di bursa saham London (Harari, 2020).

Keuntungan Inggris sebagai kota perdagangan dan keuangan global meningkatkan cadangan emas dan telah membentuk porsi sebagai pendapatan nasional. Penambahan logam menjadi semakin signifikan ketika ditemukan tambang-tambang baru di wilayah koloni, yang tentunya termasuk pengangkutan emas dari pembayaran upeti. Di sini, negara yang tidak memiliki koloni akan sulit dapat menghasilkan kekayaan yang terdiri dari uang, atau emas dan perak. Dengan kata lain, negara yang tidak memiliki tambang sendiri harus mengambil emas dan perak dari negara-negara asing. Begitupun ketika negara tersebut tidak memiliki sejumlah komoditi seperti cengkeh, pala, lada, teh, gula, tembakau, dan kapas polanya juga sama—harus menariknya dari negara luar. Cara berfikir yang demikian akhirnya menempatkan bangsa-bangsa Eropa seperti

Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris terlibat peperangan berebut wilayah koloni.

Dengan demikian, posisi Inggris yang pada saat itu menjadi adidaya internasional menempatkan Inggris sebagai pendukung sejati prinsip-prinsip standar emas internasional. Hal itu karena Inggris mempunyai banyak sumberdaya yang menguntungkan sehingga dapat mengelola standar emas internasional. Karakteristik utama standar emas sebagai sistem moneter bahwa jumlah uang yang beredar sepenuhnya dikaitkan dengan cadangan emas nasional—seluruh dedominasi moneter memiliki korespondensi dengan sejumlah kuantitas emas. Di sini cadangan emas menjadi aturan yang meregulasi pasokan uang beredar domestik. Dengan mempertahankan nilai emas dalam mata uang domestik, maka otoritas moneter harus mempertahankan stabilitas harga dan menyesuaikan dengan jumlah uang yang beredar. Penggunaan standar emas kemudian diikuti beberapa negara Eropa lainnya, seperti Jerman pada awal tahun 1870-an, lalu Perancis, Belgia, Swiss, Italia, dan negara-negara Skandinavia lainnya. Amerika menggunakan standar emas pada akhir abad ke-19, sementara Jepang menerapkan standar emas pada tahun 1879 (Suseno, 2004). Penggunaan standar emas berakhir pada masa Perang Dunia Pertama. Karena sebagai akibat perang arus perdagangan dan mobilitas emas antarnegara menjadi terganggu, sehingga standar tersebut

tidak dapat dipertahankan lagi. Selain itu, besarnya kebutuhan pembiayaan perang membuat negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama, seperti Perancis, mendorong pemerintahnya untuk mencetak uang lebih banyak yang tidak sepenuhnya dapat lagi dijamin dengan cadangan emas.

Periode Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua: 1915-1944

Perang Dunia Pertama terjadi antara Juli 14 hingga 11 November 1918. Perang ini tercatat sebagai salah satu perang besar dalam sejarah peradaban modern umat manusia. Sebelum perang mengemuka beberapa negara Eropa sudah terlibat dalam beberapa pertentangan, misalnya antara Inggris dan Jerman sudah terjadi persaingan dalam dunia industri dan antara Serbia dan Austria-Hongaria terjadi konflik perebutan wilayah. Pada masa itu, negara-negara yang memiliki persamaan kepentingan kemudian membentuk aliansi pertahanan untuk menopang keamanan nasional dalam berhadapan dengan kekuatan negara lainnya. Namun tatkala muncul suatu aliansi, maka negara lain yang memiliki persamaan persepsi ancaman keamanan melakukan hal yang sama: membentuk aliansi tandingan. Fenomena inilah yang mengemuka di Eropa sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama, bahwa ketika tahun 1882 terbentuk Aliansi Tiga yang terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia maka disusul kemudian

Aliansi Entente Tiga yang terdiri dari Inggris, Perancis, dan Rusia.

Dalam konteks aliansi militer bahwa negara-negara anggota harus membantu jika salah satu dari mereka mendapatkan serangan dari negara lain. Untuk itu, ketika Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia maka militer Rusia ikut campur membela Serbia. Demikian pula Jerman menyatakan perang terhadap Rusia karena Jerman memiliki aliansi dengan Austria-Hongaria. Menyusul kemudian Inggris menyatakan perang terhadap Jerman karena telah menginvasi Belgia—Inggris memiliki perjanjian untuk melindungi Belgia dan Perancis. Dengan masuknya Inggris, medan pertempuran bertambah luas dalam skala geografis yang tidak hanya terjadi Front Barat melainkan juga di Eropa Timur dan Tenggara, Afrika dan Timur Tengah. Bahkan Amerika Serikat yang sebelumnya bersikap netral terhadap ketegangan di Eropa namun pada 7 Desember 1917 menyatakan perang terhadap sekutu Jerman Austria-Hongaria karena terprovokasi oleh serang kapal selam Jerman. Dengan masuknya Amerika Serikat dalam kancah Perang Dunia semakin menambah kekuatan Triple Entente. Alhasil, pada tahun 1918 Jerman dan sekutunya setelah menyadari tidak mungkin lagi dapat memenangkan perang karena harus bertempur di dua front terpaksa menandatangani gencatan senjata.

Akhir Perang Dunia Pertama nyaris membuat Jerman bangkrut sebagai negara karena begitu besarnya kerugian perang yang harus ditanggung. Perjanjian Versailles (1919) memaksa Jerman harus membayar pampasan perang dengan jumlah 132 milyar mark emas (\$ 31,4 miliar); mengembalikan wilayah (Alsace-Lorraine) ke Perancis, menyerahkan wilayah Eupen dan Malmedy ke Belgia, Denmark mendapatkan Schleswig utara, Polandia memperoleh wilayah Prussia Barat dan Silesia, Cekoslowakia mendapatkan distrik Hultschin, kota Danzig dengan jumlah penduduk mayoritas etnis Jerman menjadi Kota Merdeka, Jerman menerima pasukan militer sekutu di tepi barat Sungai Rhine, di luar Eropa Jerman harus menyerahkan wilayah koloninya kepada Mandat Liga Bangsa-Bangsa, dan Jerman juga kehilangan aset luar negeri karena disita Sekutu. Disamping itu, betapapun Perang Dunia Pertama hanya berlangsung selama empat tahun dan empat bulan, namun perang ini selamanya mengubah lanskap sosial dan politik dunia. Yaitu empat kerajaan kehilangan eksistensinya: Kekaisaran Rusia pada 1917, Jerman dan Austria-Hongaria tahun 1918, dan disusul keruntuhan Daulah Utsmani tahun 1922.

Selama Perang Dunia Pertama, untuk pembiayaan perang mendorong beberapa negara melepaskan standar emasnya dengan beralih ke sistem nilai tukar mengambang.

Dengan sistem ini, nilai mata uang ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar dan pemerintah tidak perlu lagi menjamin peredaran uang sebesar emas tertentu. Penerapan sistem ini bertujuan menutupi defisit pengeluaran pemerintah untuk menutupi pembiayaan perang. Akibatnya, pencetakan uang yang berlebihan tanpa didasarkan atas cadang emas yang tersedia memicu terjadinya hiperinflasi. Tingginya kondisi inflasi menyadarkan negara-negara di Eropa untuk kembali menggunakan standar emas guna menstabilkan tingkat harga dan disiplin kebijakan fiskal. Dalam standar emas baru ini, nilai tukar suatu negara tidak hanya dikaitkan dengan cadangan emas, tetapi juga dikaitkan valuta asing yang dimiliki. Standar ini sering disebut *gold exchange standard*.

Inggris kembali ke standar emas pada tahun 1925 dengan nilai uang ditetapkan sama seperti sebelum praperang. Namun, penetapan nilai uang pound sebesar nilai sebelum perang justru berdampak negatif terhadap perekonomian Inggris. Di sini mata uang yang berlebihan nilainya mencegah terjadinya ekspor dan mendorong impor, kondisi ini menimbulkan dampak berantai terhadap industri Inggris karena menguatnya nilai tukar mata uang membuat produk-produk ekspor akan bertambah mahal sehingga berpengaruh terhadap turunnya permintaan pasar di pasar internasional. Sementara Perancis yang ketika itu juga kembali ke standar emas menyesuaikan nilai

mata uangnya dengan kondisi riil atau lebih rendah nilainya dari masa praperang. Kebijakan depresiasi ini menjadikan ekonomi Perancis lebih baik. Hal ini berbeda dalam kasus Inggris ketika kembali ke standar emas nilai tukar pound mengalami apresiasi sehingga mengakibatkan terjadinya deflasi—keadaan ini jika berlangsung terus menerus akan menekan tingkat harga, mengurangi jumlah investasi, menambah pengangguran, dan sebagainya.

Namun demikian, pengembalian ke standar emas menjadi semakin buruk ketika Amerika Serikat mengalami Depresi Besar. Sebagai akibat depresi ekonomi, beberapa negara kemudian kembali menanggalkan standar emas. Alasannya, salah satunya sistem standar emas dianggap tidak fleksibel karena pencetakan uang baru tidak dapat dilakukan jika tidak memiliki sejumlah cadangan emas tertentu. Untuk mengingat keterbatasan ini, maka pada September 31 Inggris kembali meninggalkan standar emas. Hal ini juga dipicu Inggris karena telah kehilangan banyak emas akibat defisit neraca pembayaran dan hilangnya kepercayaan terhadap poundsterling. Amerika pada April 1933 juga meninggalkan standar emas, namun pada Januari 1934 Amerika kembali pada standar emas dengan menetapkan harga satu ons emas sama dengan 35 dollar Amerika. Sementara Perancis baru meninggalkan standar emas pada tahun 1936 akibat pelarian frach yang dipicu oleh

ketidakstabilan ekonomi dan politik, tapi akibatnya perekonomian Perancis menjadi lebih buruk dibandingkan negara lain. Jadi, setelah pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1933 beberapa negara menggunakan sistem nilai tukar tetap dengan tidak lagi mengacu pada standar emas tapi pada mata uang tertentu, seperti Inggris yang menetapkan nilai poundsterling sebesar 4,03 dollar Amerika.

Sistem Bretton Woods: 1946-1972

Dalam Perang Dunia Kedua, Amerika sekali lagi terlibat karena terprovokasi oleh Jepang yang menyerang Pearl Harbour pada 7 Desember 1941. Jepang kemudian menyerah setelah Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Di Eropa, Nazi jatuh setelah pasukan sekutu di bawah Amerika dan sekutunya melakukan serangan gabungan untuk menundukan Nazi Jerman. Pasca Perang Dunia Kedua, Amerika menjadi negara adidaya menggantikan negara-negara Eropa yang sudah sekarat lantaran rangkaian perang-depresi-perang—dua kali Perang Dunia pada hakikatnya sebagai perang saudara antarsesama bangsa Eropa yang disebabkan oleh masalah Jerman. Dengan posisinya itu, Amerika sebagai negara terkaya di dunia serta juga terkuat secara militer tanpa bantuan Amerika sulit bagi negara-negara Eropa bisa segera bangkit dari keterpurukan. Sementara itu, di lain pihak tidak hanya Amerika yang muncul sebagai negara besar, namun ada juga Uni

Soviet yang menjadi kekuatan besar dunia yang berhasil membebaskan Eropa dari amukan Nazi Jerman. Berangkat dari kenyataan itulah, maka Amerika tidak ingin menyerahkan Eropa kepada Uni Soviet. Dengan kata lain, karena Uni Sovietlah yang membuat Amerika tetap tinggal sebagai pemimpin negara-negara Eropa hingga kemudian berkembang menjadi Perang Dingin.

Dengan tampilnya Amerika sebagai negara adidaya, maka dollar pun menggantikan poundsterling sebagai mata uang dominan. Namun asal muasal dolar Amerika menjadi acuan nilai tukar dunia merupakan hasil konfrensi Bretton Woods pada Juli 1944 yang diikuti sebanyak 44 negara. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pada Desember 1966 ditetapkan suatu tatanan moneter internasional baru, yaitu penetapan sistem nilai tukar tetap oleh 32 negara. Dalam sistem moneter baru ini, nilai mata uang sebuah negara berdasarkan diri pada sistem nilai tukar tetap terhadap dolar Amerika. Sementara dolar sendiri dikaitkan dengan emas, yaitu setiap 1 ons emas (sekitar 30 gram) ditetapkan harganya sebesar USD35.

Pemilihan dolar Amerika sebagai dasar acuan adalah karena ketika hanya Amerika yang mempunyai cadangan emas terbesar, yaitu nyaris menguasai tiga perempat dari seluruh cadangan emas dunia. Dengan kata lain, waktu itu tidak ada satu

pun negara yang memiliki cadangan emas yang setara dengan semua yang dimiliki Amerika. Dengan demikian, negara-negara anggota Bretton Woods pun menyepakati dolar sebagai alat pembayaran resmi menggantikan emas. Melalui sistem Bretton Woods, nilai tukar antarmata uang di luar dolar menjadi tetap (*fixed*) dengan mengacu pada nilai mata uang Amerika tersebut. Namun di sini yang perlu digarisbawahi bahwa mata uang setiap negara tidak bisa ditukar dengan emas secara langsung melainkan terlebih dahulu harus membeli dolar, yang dengan dolar itu dapat ditukarkan dengan emas—itulah mengapa sistem ini dikenal juga sebagai sistem nilai tukar emas berbasis dolar.

Meskipun demikian, sistem Bretton Woods tidak diberlakukan secara global mengingat blok komunis tidak menjadi bagian dari perjanjian tersebut. Selain menghasilkan penetapan nilai tukar tetap terhadap dolar Amerika, konferensi Bretton Woods juga mengawali terbentuknya lembaga moneter internasional atau IMF dan IBRD/Bank Dunia yang dimaksudkan untuk mengawasi berjalannya sistem. Pembentukan lembaga moneter internasional ini bertujuan untuk menghentikan berulangunya nasionalisme ekonomi dengan aturan main yang tidak jelas sebagaimana terjadi dalam periode Perang Dunia. Namun, pada perkembangannya Amerika Serikat di tahun 1971 secara sepihak menyatakan tidak lagi

dapat memenuhi komitmennya untuk mematok dolar Amerika terhadap emas dengan nilai 35 dolar per ons. Dengan kata lain, Amerika mulai menarik diri dari kewajiban menopang sistem nilai tukar emas berbasis dolar. Hal ini karena Amerika mengalami tekanan psikologis dalam menghadapi serangan spekulasi berskala luas terhadap dolar Amerika tidak lama setelah pembengkakan defisit neraca pembayaran yang sebagian besar disebabkan oleh Perang Vietnam yang berkepanjangan. Sejalan dengan perubahan tersebut, maka sejak tahun 1973 negara-negara anggota IMF diperbolehkan mengembangkan (*floating*) nilai tukar mata uangnya. Dalam merespon perubahan tersebut tidak semua negara terpengaruh dengan kebijakan nilai tukar mengambang, melainkan banyak negara tetap memilih mempertahankan sistem tukar tetap atau variasi dari kedua jenis sistem nilai tukar mengambang dan sistem nilai tukar tetap.

Adapun perbedaan antara sistem nilai tukar mengambang (*floating exchange rate*) dan sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pilihan kebijakan penerapan salah satu dari keduanya sangat tergantung pada keadaan masing-masing negara. Di sini kelebihan sistem mengambang memungkinkan suatu sistem ekonomi yang telah matang untuk masuk ke pasar finansial global. Sistem moneternya

dapat dipakai untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi dalam negeri, dan pengaruhnya terhadap perdagangan internasional cukup signifikan. Sebaliknya, kekurangan sistem *floating exchange rate* sangat riskan bagi negara kecil dan rentan terhadap perubahan-perubahan sosial politik di dalam negeri (Rachbini, 2003). Singkatnya, keunggulan diantara kedua pilihan kebijakan tersebut ditentukan oleh efektivitas kebijakan moneter dan kekuatan ekonomi suatu negara, karena situasi yang berbeda tentu saja membutuhkan sistem nilai tukar yang berbeda.

Pasca Bretton Woods: 1973-Sekarang

Selama periode 1944-1973, dolar Amerika menjadi mata uang yang sangat penting dalam lalu lintas pembayaran internasional. Nilai tukar dollar Amerika terhadap mata uang negara lain tetap kuat betapapun sistem Bretton Woods telah ambruk karena ditopang oleh stabilitas keuangan dan kondisi politik. Bahkan sejak keruntuhan sistem Bretton Woods transaksi-transaksi valuta asing meningkat beberapa kali lebih tinggi. Hal ini berbeda dibandingkan tahun-tahun awal pembentukan sistem Bretton Woods dimana arus modal internasional dikontrol secara ketat. Dalam hal ini investor dari Inggris tidak mungkin bisa menanamkan saham atau obligasi Amerika. Sebagian besar modal asing yang ditanamkan ke negara-negara berkembang berbentuk bantuan atau hibah pemerintah.

penanaman investasi asing langsung ke negara-negara berkembang, bukan dalam bentuk pemberian pinjaman bank komersial dan arus investasi portofolio (Singh, 2005).

Dengan berakhirnya sistem Bretton Woods, pada Januari 1976 anggota IMF bertemu di Jamaika untuk menyetujui peraturan sistem nilai tukar yang baru yaitu; 1) kurs fleksibel bagi anggota IMF; 2) emas secara resmi dibebaskan sebagai aset cadangan internasional; dan 3) negara-negara nonpengekspor minyak dan negara kurang berkembang diberi akses lebih besar terhadap dana IMF. Dalam kaitan ini, IMF menyediakan bantuan kepada negara-negara yang menghadapi kesulitan neraca pembayaran dan kurs tukar. Namun, yang menjadi persoalan sejak keruntuhan sistem Bretton Woods menimbulkan berbagai jenis jenis krisis keuangan (seperti krisis perbankan, krisis mata uang, atau keduanya) terjadi baik di negara-negara maju maupun berkembang. Hal ini seperti krisis keuangan pertama terjadi di Chili pada awal tahun 1980-an. Krisis kedua pecah pada tahun 1992-1993, ketika beberapa mata uang yang berada dalam zona *European Monetary System* (EMS) mendapat serangan spekulatif.

Krisis keuangan berikutnya terjadi di Asia Tenggara tahun 1997 merontokkan perekonomian Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Hal itu karena mereka sebelumnya menerima arus modal masuk dalam jumlah yang sangat besar, termasuk pinjaman dari

sektor perbankan (dalam bentuk mata uang asing)—sebagian besar pinjaman luar negeri tidak disalurkan untuk kegiatan-kegiatan produktif yang menghasilkan penerimaan dari perdagangan luar negeri, dan modal portofolio (khususnya pembelian saham oleh investor asing di pasar modal dalam negeri). Dalam upaya mengatasi krisis keuangan, beberapa negara mengambil strategi kebijakan yang berbeda. Beberapa negara melepaskan sistem nilai tukar tetap dan menyerahkan pada mekanisme pasar dalam menentukan kurs seperti Chili, Thailand dan Indonesia. Sementara itu, beberapa negara justru sebaliknya menggunakan sistem nilai tukar tetap, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia pada bulan September 1998 dengan menerapkan ketentuan nilai tukar tetap dan melakukan pengawasan secara selektif terhadap arus modal.

KESIMPULAN

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa setiap kali terjadi perubahan pada sistem moneter dari satu model ke model lainnya tidak terlepas dari kepentingan ekonomi politik negara hegemon. Dengan kata lain, di balik perubahan sistem moneter global selalu terdapat aktor (negara) yang mengambil manfaat atau didasarkan kepada kepentingan hegemoni mereka untuk melayani kebijakan luar negeri dan kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini, ketika Inggris tampil sebagai pembela standar emas klasik tidak didorong oleh

semangat kedermawanan, demikian pula dengan Amerika Serikat yang mengambil peran sebagai penjaga sistem nilai tukar berbasis dolar pasca Perang Dunia Kedua. Namun di balik semua itu memiliki tujuan yang sama: memperoleh keuntungan sebesar-besarnya melalui pengelolaan sistem keuangan global.

DAFTAR PUSTAKA

Harari, Noah, Yuval, *Money: Hikayat Uang dan Lahirnya Kaum Rebahan*, Kota Madado: Global Indo Kreatif, 2020.

Rachbini, Didik J, Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Rothermund, Dietmar, *Great Depression: Depresi Besar Ekonomi Amerika 1929-1939 dan Dampaknya terhadap Kehancuran Ekonomi Dunia*, Imperium: Yogyakarta, 2008.

Singh, Kavaljit, *Menjinakkan Arus Keuangan Global*, INFID, Jakarta, 2005.

Suseno, Simorangkir, Iskandar, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta, 2004.